



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 94, Lamongan, Jawa Timur 62212

Telp. (0322) 321501, Pos-el disperindag@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 14 April 2025

Nomor : 050/128/413.123/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2025 Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
I Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



ANANG TAUFIK, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199602 1 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I TAHUN 2025



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Panglima Sudirman No. 94 Lamongan Kode Pos 62012 Telp. (0322) 321501 Fax: (0322)321501
E – mail : disperindag@lamongankab.go.id, Web Site :
www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	MR - 01
TANGGAL TERBIT	:	14 April 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi FIFIT LESTARI, SE.,MM NIP. 19830607 201001 2 002
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan MIFTAHUL ULUM, SE.,MM NIP. 19790825 200312 1 005
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan   ANANG TAUFIK, S.STP.,M.Si NIP. 19750404 199602 1 003

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan:						
1	Pembinaan Sentra Industri, Pelatihan dan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	Tribulan 3	Tribulan 3	Belum terlaksana
2	Sosialisasi dan Fasilitasi Terkait Program Ekspor dan Kerjasama Dengan beberapa instansi terkait	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	Tribulan 2	Tribulan 2	Sudah terlaksana
3	Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang, Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	Tribulan 1 s/d 4	Tribulan 1 s/d 4	Tribulan 1 sudah terlaksana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Operasional OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan:						
1	Pengembangan Tim Pengelolaan Sertifikasi SNI Sarana Distribusi Perdagangan	Pemantauan Langsung	Kepala Bidang Perdagangan	Tribulan 1	Tribulan 1	Sudah terlaksana
2	Pembentukan Tim Pemantau Harga Antarwaktu	Pemantauan Langsung	Kepala Bidang Perdagangan	Tribulan 1	Tribulan 1	Sudah terlaksana
3	Sosialisasi dan Fasilitasi Terkait Program Ekspor dan Kerjasama Dengan beberapa pihak terkait	Pemantauan Langsung	Kepala Bidang Pemasaran	Tribulan 2	Tribulan 2	Sudah terlaksana
4	Pembinaan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	Pemantauan Langsung	Kepala Bidang Pengembangan Industri dan Kepala Bidang Pemberdayaan Industri	Tribulan 3	Tribulan 3	Belum terlaksana
5	Pembentukan Tim Pemeliharaan dan Pelaksana Penggunaan Alat-Alat Ukur Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada	Pemantauan Langsung	Kepala Bidang Perdagangan	Tribulan 1	Tribulan 1	Sudah terlaksana
6	Melaksanakan Monitoring Pada IKM Penerima Bantuan Alat Produksi dan Mengevaluasi Terbitnya Sertifikat	Pemantauan Langsung	Kepala Bidang Pengembangan Industri	Tribulan 4	Tribulan 4	Belum terlaksana
7	Mengevaluasi Terbitnya Nomor Induk Berusaha Bagi IKM	Pemantauan Langsung	Kepala Bidang Pengembangan Industri	Tribulan 4	Tribulan 4	Belum terlaksana
8	Monitoring Industri Terkait Pemenuhan Laporan SIINAS	Pemantauan Langsung	Kepala Bidang Pengembangan Industri	Tribulan 4	Tribulan 4	Belum terlaksana

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah
(lampiran, form 10 dari simario)

NO	“RISIKO” YANG TERINDENTIF IKASI	KODE RISIKO	KEJADIAN RISIKO			KETERANGAN	RTP	RENCANA PELAKSANAAN RTP	REALISASI PELAKSANAAN RTP	KETERANGAN
			TANGGAL TERJADI	SEBAB	DAMPAK					
Risiko Strategis OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
1	Rendahnya pertumbuhan pelaku usaha IKM	RSO.25.3 1.29.01	Nihil	-	-	-	Pembinaan Sentra Industri, pelatihan dan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	Tribulan 3	Tribulan 3	Belum terlaksana
2	Ekspor Non Migas kurang maksimal	RSO.25.3 0.29.01	Nihil	-	-	-	Sosialisasi dan Fasilitasi Terkait Program Ekspor dan Kerjasama Dengan beberapa instansi terkait	Tribulan 2	Tribulan 2	Sudah terlaksana
3	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.25.3 0.29.01	Nihil	-	-	-	Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang, Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang	Tribulan 1 s/d 4	Tribulan 1 s/d 4	Tribulan 1 sudah terlaksana

NO	"RISIKO" YANG TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	KEJADIAN RISIKO			KETERANGAN	RTP	RENCANA PELAKSANAAN RTP	REALISASI PELAKSANAAN RTP	KETERANGAN
			TANGGAL TERJADI	SEBAB	DAMPAK					
Risiko Operasional OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
1	Kondisi sarana distribusi perdagangan (Pasar rakyat dan sentra PKL) belum memenuhi SNI	ROO.25.30.29.01	Nihil	-	-	-	Pengembangan Tim Pengelolaan Sertifikasi SNI Sarana Distribusi Perdagangan	Tribulan 1	Tribulan 1	Sudah terlaksana
2	Kenaikan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar	ROO.25.30.29.02	Nihil	-	-	-	Pembentukan Tim Pemantau Harga Antarwaktu	Tribulan 1	Tribulan 1	Sudah terlaksana
3	Rendahnya nilai ekspor	ROO.25.30.29.03	Nihil	-	-	-	Sosialisasi dan Fasilitasi Terkait Program Eksport dan Kerjasama Dengan beberapa pihak terkait	Tribulan 2	Tribulan 2	Sudah terlaksana
4	Rendahnya permintaan pasar	ROO.25.30.29.04	Nihil	-	-	-	Pembinaan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	Tribulan 3	Tribulan 3	Belum terlaksana
5	Masih dijumpai penjualan barang yang beredar dengan kecurangan dalam alat ukur timbang dan takar	ROO.25.30.29.05	Nihil	-	-	-	Pembentukan Tim Pemeliharaan dan Pelaksana Penggunaan Alat-Alat Ukur Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada	Tribulan 1	Tribulan 1	Sudah terlaksana
6	Rendahnya daya saing produk ikm	ROO.25.31.29.06	Nihil	-	-	-	Melaksanakan Monitoring Pada IKM Penerima Bantuan Alat Produksi dan Mengevaluasi Terbitnya Sertifikat	Tribulan 4	Tribulan 4	Belum terlaksana
7	Masih ada IKM yang belum memiliki legalitas usaha	ROO.25.31.29.07	Nihil	-	-	-	Mengevaluasi Terbitnya Nomor Induk Berusaha Bagi IKM	Tribulan 4	Tribulan 4	Belum terlaksana
8	Pemanfaatan sistem informasi nasional yang masih rendah	ROO.25.31.29.08	Nihil	-	-	-	Monitoring Industri Terkait Pemenuhan Laporan SIINAS	Tribulan 4	Tribulan 4	Belum terlaksana

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

1. Hambatan yang menyebabkan Rendahnya pertumbuhan pelaku usaha IKM adalah Kemampuan SDM Yang Masih Rendah, Minimnya Sarana Prasarana Produksi Yang Dimiliki, Kurangnya tentang informasi permodalan
2. Hambatan yang menyebabkan Ekspor Non Migas kurang maksimal adalah Gejolak ekonomi global, Kurangnya kuantitas komoditi produk ekspor non migas, Kurangnya akses pasar ekspor
3. Hambatan yang menyebabkan Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal adalah Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal
4. Hambatan yang menyebabkan Kondisi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat dan Sentra PKL Belum Memenuhi SNI) adalah Rendahnya Pemahaman Pengelolah Sarana Distribusi Perdagangan Untuk Menciptakan Pasar Yang Memenuhi SNI
5. Hambatan yang menyebabkan Kenaikan harga bahan pokok menjelang hari - hari besar adalah Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas dari bahan pangan pokok
6. Hambatan yang menyebabkan rendahnya nilai ekspor adalah, Gejolak ekonomi dan persaingan global, minimnya pemahaman pelaku IKM terhadap legalitas yang berdampak pada kegiatan ekspor
7. Hambatan yang menyebabkan Rendahnya Permintaan Pasar adalah, Gejolak Ekonomi, Persaingan Global, Kualitas produk
8. Hambatan yang menyebabkan Masih Dijumpai Penjualan Barang Yang Beredar Dengan Kecurangan Dalam Alat Ukur Timbang dan Takar adalah Masih Banyaknya Alat UTTP Yang Belum Ditera Atau Tera Ulang
9. Hambatan yang menyebabkan Rendahnya Daya Saing Produk IKM adalah Kemampuan SDM Yang Masih Rendah Minimnya Sarana Prasarana Produksi Yang Dimiliki
10. Hambatan yang menyebabkan masih ada IKM yang belum memiliki legalitas usaha adalah kurangnya informasi pada Masyarakat tentang perijinan (PIRT)
11. Hambatan yang menyebabkan Pemanfaatan Sistem Informasi Nasional Yang Masih Rendah adalah kurangnya Sosialisasi SIINAS Kepada Para IKM

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat simpulan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi di kemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan resiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat dicapai.